Amankan 24 Tersangka Peredaran Narkoba

CIMAHI, (PR).-

Sebanyak 24 tersangka kasus narkoba berhasil diamankan jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Cimahi sepanjang periode Oktober 2024. Para pelaku terlibat dalam 22 kasus peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi.

"Para tersangka ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan beberapa jenis narkoba, di antaranya sabu, ganja, tembakau sintetis, psikotropika, dan obat keras terlarang (OKT). Nilai dari barang haram tersebut mencapai Rp 1,2 miliar," ujar Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto didampingi Kasatresnarkoba AKP Tanwin Nopiansyah, di Mapolres Cimahi, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi, Rabu (23/10/2024).

Dari 24 tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 359,12 gram sabu, 128,71 gram ganja, 48,36 gram tembakau sintetis, 14.927 butir OKT berbagai jenis, serta 2.131 butir psikotropika. "Dengan jumlah barang haram yang diamankan, jika dikonversikan berhasil menyelamatkan sekitar 10 ribu jiwa," imbuhnya.

Disebutkannya, para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan kasus masing-masing. Tri merinci, untuk kepemilikan sabu dan tembakau sintetis dikenakan Pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun hingga seumur hidup, serta denda minimal Rp 800 juta hingga Rp 8 miliar.

Kasus kepemilikan ganja dikenakan Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun serta denda serupa.

Untuk peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, para tersangka dihadapkan dengan Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup, serta denda maksimal Rp10 miliar.

Khusus kasus psikotropika, tersangka dikenakan Pasal 60 ayat 1 poin B dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara untuk kasus OKT, para tersangka dikenakan Pasal 435 *juncto* 138 Ayat 2 dan atau Pasal 436 Ayat 2 *juncto* Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar. (Ririn Nur Febriani)***